



Membungkam Pikiran Lewat Penyitaan Buku: Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk Pada Pemberitaan Kompas.com

Isna Alicia Putri^{1*}  Cecep Dudung Julianto²  Lina Siti Nurwahidah³ 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pengetahuan Ilmu Sosial,
Bahasa, dan Sastra, Institut Pendidikan Indonesia

E-mail Korespondensi: *isnaalicia04@gmail.com

Abstrak

Penyitaan buku oleh aparat negara memunculkan perdebatan dalam ruang demokrasi karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berpikir dan berekspresi. Penelitian ini bertujuan mengungkap representasi tindakan penyitaan buku dalam pemberitaan Kompas.com melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis model Teun A. van Dijk. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data berupa berita “Represif Polisi: Menyita Buku Membungkam Pikiran”. Analisis dilakukan melalui dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com membingkai penyitaan buku sebagai bentuk pembatasan kebebasan berpikir melalui narasi kritis terhadap tindakan aparat negara. Pada dimensi kognisi sosial, penulis berita menunjukkan cara pandang kritis terhadap tindakan aparat yang dipersepsikan membatasi ruang intelektual publik. Sementara itu, pada dimensi konteks sosial, pemberitaan merepresentasikan penyitaan buku sebagai bagian dari ketegangan relasi antara negara dan masyarakat dalam ruang demokrasi. Temuan ini menegaskan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk konstruksi ideologis mengenai kebebasan berpikir dan relasi kuasa dalam masyarakat.

Kata Kunci: analisis wacana kritis, van Dijk, penyitaan buku, media digital, kebebasan berpikir

Abstract

Book confiscation by state authorities has sparked debate within democratic spaces because it is considered capable of restricting freedom of thought and expression. This study aims to reveal the representation of book confiscation in Kompas.com news coverage through Teun A. van Dijk's Critical Discourse Analysis approach. The study employed a descriptive qualitative method using the news article entitled "Represif Polisi: Menyita Buku Membungkam Pikiran" as the data source. The analysis was conducted through the dimensions of text, social cognition, and social context. The findings show that Kompas.com framed book confiscation as a form of restriction on freedom of thought through a critical narrative toward state authorities' actions. In the dimension of social cognition, the journalist demonstrated a critical perspective toward the authorities' actions, which were perceived as limiting the public intellectual sphere. In the dimension of social context, the news represented book confiscation as part of the tension in power relations between the state and society within a democratic context. These findings confirm that the media not only disseminates information but also constructs ideological meanings regarding freedom of thought and power relations in society.

Keywords: critical discourse analysis, van Dijk, book confiscation, digital media, freedom of thought

A. PENDAHULUAN

Di era digital, media massa memegang peranan krusial dalam membentuk opini publik dan merepresentasikan realitas sosial. Berita tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan, dan relasi kekuasaan melalui pemilihan diksi, struktur narasi, serta strategi penyusunan teks (McQuail & Deuze, 2020). Dengan demikian,



media memiliki kemampuan untuk membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu peristiwa melalui konstruksi bahasa yang digunakan dalam pemberitaan.

Di Indonesia, praktik pemberitaan kerap memperlihatkan bagaimana media membingkai isu-isu sensitif yang berkaitan dengan demokrasi, kebebasan berpikir, dan hak berekspresi. Salah satu fenomena yang memicu perhatian publik adalah penyitaan sejumlah buku oleh aparat kepolisian pada September 2025 karena dianggap memuat ideologi tertentu. Tindakan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan intelektual di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin hak warga negara untuk berpikir dan berpendapat secara bebas.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia masih berada dalam posisi yang rentan terhadap praktik kekuasaan. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi karena menjadi prasyarat bagi partisipasi publik serta kontrol terhadap kekuasaan negara dalam ruang publik (Habermas, 2006). Dalam situasi ini, media massa memiliki posisi strategis dalam menentukan arah wacana publik, apakah memperkuat legitimasi kekuasaan atau menghadirkan ruang kritik terhadap tindakan negara. Oleh karena itu, pemberitaan mengenai penyitaan buku menjadi penting untuk dikaji karena media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk wacana publik mengenai legitimasi tindakan aparat dan makna kebebasan berpikir dalam kehidupan demokratis.

Untuk mengkaji konstruksi wacana dalam pemberitaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Teun A. van Dijk. Wacana merupakan praktik sosial yang berkaitan erat dengan ideologi dan relasi kekuasaan (van Dijk, 2009; 2018; 2021). Pendekatan ini banyak digunakan dalam kajian media karena mampu mengungkap hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam teks berita. Dalam pandangan van Dijk, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan atau menentang dominasi tertentu dalam masyarakat.

Model van Dijk mencakup tiga dimensi utama, yakni teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dimensi teks digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana struktur dan strategi kebahasaan dalam berita membangun representasi tertentu terhadap suatu peristiwa. Sementara itu, dimensi kognisi sosial mengkaji bagaimana pengetahuan, pengalaman, serta sistem kepercayaan penulis berita memengaruhi proses produksi teks. Adapun dimensi konteks sosial berfokus pada kondisi sosial, politik, dan ideologis yang melatarbelakangi lahirnya suatu wacana. Melalui ketiga dimensi tersebut, model van Dijk dapat digunakan untuk mengungkap bagaimana media mereproduksi, memperkuat, atau bahkan menentang relasi kekuasaan dalam masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media massa cenderung memiliki kecenderungan ideologis dalam membingkai isu publik. Penelitian yang dilakukan oleh Karmizi dan Gustia menunjukkan bahwa Detik.com dan Kompas.com menghadirkan pembedaan berbeda dalam pemberitaan isu ijazah palsu Jokowi. Perbedaan tersebut tampak pada fokus tema, citra tokoh yang dibangun, serta pemilihan diksi dan gaya bahasa yang digunakan dalam teks berita (Karmizi & Gustia, 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa media memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi publik melalui strategi wacana yang digunakan.

Penelitian lain mengenai pemberitaan kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan kekasihnya menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun citra moral dan sosial terhadap pihak yang diberitakan melalui pemilihan kata, urutan peristiwa, dan gaya penulisan tertentu (Banjarnahor et al., 2024). Selain itu, penelitian mengenai pro-kontra pengiriman anak ke barak militer menemukan bahwa media menghadirkan dua kutub pandangan yang berlawanan melalui penggunaan istilah bernuansa ideologis dan strategi retorik tertentu (Putri et al., 2025).

Kajian lain juga memperlihatkan bahwa struktur bahasa dalam media digunakan untuk membangun narasi tertentu terhadap peristiwa sosial. Struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro digunakan untuk membangun makna ideologis dalam pemberitaan viral pembatalan pernikahan adat (Simanungkalit et al., 2025). Sementara itu, strategi kebahasaan juga digunakan untuk membangun citra positif aktor politik di ruang publik (Rahma et al., 2026). Dalam konteks digital, media memiliki peran penting dalam membentuk praktik demokrasi dan kebebasan berekspresi sehingga tidak bersifat netral dalam merepresentasikan realitas sosial (Rahmawati et al., 2023).



Secara umum, studi-studi terdahulu memperlihatkan bahwa model van Dijk efektif digunakan untuk mengungkap relasi antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan dalam teks media. Akan tetapi, penelitian sebelumnya masih didominasi oleh kajian mengenai isu politik, kriminal, dan fenomena sosial populer. Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, penelitian ini berfokus pada pemberitaan penyitaan buku sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berpikir dalam konteks demokrasi dan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan konteks kajian yang lebih spesifik dalam melihat representasi media terhadap isu kebebasan berpikir.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kompas.com merepresentasikan tindakan penyitaan buku melalui dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial dalam model van Dijk. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konstruksi wacana media terhadap isu penyitaan buku dalam pemberitaan Kompas.com. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Analisis Wacana Kritis dalam konteks media digital. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana media membentuk wacana kebebasan berpikir melalui konstruksi bahasa dan ideologi dalam teks berita.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Teun A. van Dijk. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap relasi antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan dalam teks media melalui analisis terhadap dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan isi berita, tetapi juga menginterpretasikan konstruksi wacana yang dibangun media dalam merepresentasikan isu penyitaan buku.

Data utama penelitian berupa satu teks berita digital berjudul “Represif Polisi: Menyita Buku Membungkam Pikiran” yang ditulis oleh Hidayatullah Rabbani dan diedit oleh Sandro Gatra, kemudian diterbitkan oleh Kompas.com pada 18 September 2025 yang dijadikan sebagai data primer. Pemilihan berita tersebut didasarkan pada beberapa kriteria, yakni memuat isu penyitaan buku yang berkaitan dengan kebebasan berpikir, diterbitkan oleh media nasional arus utama, serta memiliki kecenderungan penggunaan bahasa argumentatif dan kritis yang relevan untuk dianalisis menggunakan model van Dijk. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa informasi sosial-politik dan berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan peristiwa penyitaan buku serta kebebasan berekspresi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi digital dengan mengarsipkan teks berita secara utuh. Penelitian ini menggunakan satu teks berita digital sebagai unit data utama. Adapun unit analisis dalam penelitian ini meliputi judul, *lead*, isi berita, kutipan narasumber, serta unsur-unsur kebahasaan yang menunjukkan strategi wacana dalam pemberitaan. Setelah data terkumpul, dilakukan proses segmentasi dengan menandai bagian-bagian teks yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus analisis.

Analisis data dilakukan berdasarkan tiga dimensi dalam model Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pada dimensi teks, analisis dilakukan melalui struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Struktur makro (tematik) digunakan untuk mengidentifikasi tema atau topik dan subtopik dalam pemberitaan. Superstruktur (skematik) dianalisis melalui bagian *summary* yang meliputi judul dan *lead*, serta *story* yang mencakup situasi dan komentar dalam teks berita. Adapun struktur mikro meliputi aspek semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik. Pada aspek semantik, analisis difokuskan pada elemen latar, detail, maksud, dan praanggapan dalam teks berita. Dimensi kognisi sosial dianalisis untuk memahami bagaimana pengetahuan, pengalaman, serta sistem kepercayaan penulis berita memengaruhi proses produksi teks. Sementara itu, dimensi konteks sosial digunakan untuk mengaitkan teks berita dengan kondisi sosial, politik, dan ideologis yang melatarbelakangi peristiwa penyitaan buku, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi di ruang publik.

Untuk menunjang pengelolaan data kualitatif, penelitian ini juga menerapkan tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman (1994), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data sesuai dimensi analisis van Dijk, penyajian



data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap pola-pola ideologis yang ditemukan dalam keseluruhan hasil analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Teks

a. Struktur Makro (Elemen Tematik)

Struktur makro berkaitan dengan tema utama yang dibangun dalam suatu wacana (van Dijk, 2014). Berdasarkan hasil analisis terhadap pemberitaan Kompas.com berjudul “Represif Polisi: Menyita Buku Membungkam Pikiran”, tema utama yang dibangun adalah penyitaan buku oleh aparat kepolisian sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berpikir dan berekspresi. Penyitaan buku tidak diposisikan sebagai prosedur penegakan hukum yang netral, melainkan sebagai tindakan represif negara terhadap ide dan pemikiran kritis.

Tema tersebut diperkuat melalui sejumlah subtopik yang saling berkaitan, mulai dari gelombang protes masyarakat akibat ketidakadilan, kemiskinan, pelanggaran HAM, dan kegagalan birokrasi, hingga tindakan penyitaan buku yang dilakukan aparat kepolisian. Selain itu, pemberitaan juga menampilkan penggeledahan kantor Lokataru Foundation serta penyitaan buku-buku bertema anarkisme dan literasi kritis yang dianggap berkaitan dengan aksi demonstrasi. Penyusunan subtopik tersebut menunjukkan bahwa penyitaan buku dipandang bukan sekadar tindakan hukum, melainkan bagian dari upaya pembatasan terhadap penyebaran gagasan kritis di ruang publik.

Tabel 1 Elemen Tematik Berita “Represif Polisi: Menyita Buku Membungkam Pikiran”

Tema/Topik	Subtopik
Penyitaan buku oleh aparat kepolisian sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berpikir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gelombang protes masyarakat akibat ketidakadilan, kemiskinan, pelanggaran HAM, dan kegagalan birokrasi. 2. Penyitaan buku oleh Polda Jawa Barat sebagai barang bukti dalam aksi demonstrasi di Bandung. 3. Buku-buku bertema anarkisme yang dianggap sebagai referensi literasi kelompok pedemo. 4. Penggeledahan kantor Lokataru Foundation dan penyitaan buku serta materi literasi kritis. 5. Penyitaan buku sebagai bentuk kriminalitas terhadap pemikiran kritis dan kebebasan membaca. 6. Dampak penyitaan buku terhadap kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan iklim demokrasi.

Melalui struktur makro tersebut, Kompas.com membangun representasi bahwa tindakan aparat merupakan bentuk pembatasan terhadap ruang demokratis dan kebebasan intelektual masyarakat. Tema dan subtopik yang disusun dalam pemberitaan memperlihatkan kecenderungan media untuk menempatkan negara sebagai aktor dominan yang berupaya mengontrol penyebaran gagasan kritis di ruang publik.

b. Superstruktur (Elemen Skematik)

Superstruktur menunjukkan bagaimana skema berita disusun, mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup yang berfungsi untuk membimbing cara pembaca memahami peristiwa (van Dijk, 2013). Struktur berita diawali dengan judul yang bersifat evaluatif dan argumentatif, dilanjutkan dengan *lead* yang memuat



sikap kritis terhadap tindakan aparat, kemudian diikuti pemaparan situasi dan komentar yang memperkuat *framing* penyitaan buku sebagai bentuk pembatasan kebebasan berpikir.

Secara skematik, pemberitaan tidak menempatkan penyitaan buku sebagai peristiwa netral, melainkan langsung mengaitkannya dengan isu pembungkaman ide dan kebebasan berekspresi. Alur berita disusun secara konsisten untuk menggiring pembaca pada pemahaman bahwa tindakan aparat memiliki dampak terhadap ruang demokrasi dan kebebasan intelektual masyarakat.

Tabel 2 Elemen Skematik Berita “Represif Polisi: Menyita Buku Membungkam Pikiran”

Judul	Summary		Story	
	Lead	Situasi	Komentar	
Represif Polisi: Menyita Buku Membungkam Pikiran	Reaksi aparat keamanan terhadap gelombang protes masyarakat, khususnya melalui penyitaan buku, diposisikan sebagai bentuk ketakutan negara terhadap ide dan pemikiran kritis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gelombang protes masyarakat sejak Agustus hingga awal September 2025 yang dipicu oleh ketidakadilan, kemiskinan, pelanggaran HAM, dan kegagalan birokrasi. 2. Penyitaan buku oleh Polda Jabar yang dijadikan barang bukti kericuhan aksi demonstrasi di Bandung. 3. Buku-buku bertema anarkisme yang disebut sebagai referensi literasi kelompok pedemo anarkis. 4. Pengeledahan kantor Lokataru Foundation dan penyitaan buku, spanduk, publikasi penelitian, serta perangkat kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandangan kritis terhadap penyitaan buku sebagai bentuk kriminalitas ide dan pemikiran kritis. 2. Penilaian bahwa tindakan aparat mencerminkan kesalahan pemahaman terhadap anarkisme sebagai ideologi dan filsafat politik. 3. Argumentasi mengenai dampak penyitaan buku terhadap kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan iklim demokrasi. 	

Berdasarkan tabel elemen skematik di atas, judul berita sejak awal telah memuat sikap evaluatif melalui penggunaan diksi “represif” dan frasa “membungkam pikiran” yang secara eksplisit menempatkan polisi sebagai aktor dominan dalam pembatasan kebebasan berpikir. *Lead* berita juga berfungsi sebagai ringkasan argumentatif yang langsung mengarahkan pembaca pada sudut pandang kritis terhadap tindakan aparat.

Pada bagian *story*, situasi disajikan melalui pemaparan kronologis kasus penyitaan buku yang melibatkan aparat kepolisian dan aktivis. Sementara itu, komentar didominasi oleh penilaian kritis yang menekankan bahwa penyitaan buku bukan sekadar persoalan hukum, melainkan persoalan kebebasan intelektual dan demokrasi. Melalui susunan skematik tersebut, Kompas.com membangun *framing* bahwa tindakan aparat merupakan bentuk pembatasan terhadap penyebaran gagasan kritis di ruang publik.



c. Struktur Mikro

1) Semantik

Semantik digunakan untuk melihat bagaimana makna dibangun dan ditekankan dalam teks berita melalui elemen latar, detail, maksud, dan praanggapan (van Dijk, 2008). Dalam pemberitaan ini, elemen semantik digunakan untuk membangun representasi penyitaan buku sebagai tindakan represif yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan berpikir dan berekspresi.

a) Latar

Elemen latar dalam berita ini ditampilkan melalui penggambaran situasi sosial yang melandasi tindakan penyitaan buku oleh aparat kepolisian. Penulis membuka berita dengan paparan gelombang protes masyarakat yang dipicu oleh berbagai persoalan struktural bangsa, sebagaimana tertuang dalam kutipan berikut.

“Sejak Agustus hingga awal September 2025, gelombang protes di sejumlah kota merefleksikan ketidakpuasan rakyat atas ketidakadilan, kemiskinan, pelanggaran HAM, dan berbagai kegagalan birokrasi.”

Penggunaan diksi seperti *ketidakadilan*, *kemiskinan*, *pelanggaran HAM*, dan *kegagalan birokrasi* menunjukkan bahwa penyitaan buku ditempatkan dalam situasi sosial yang penuh ketegangan dan ketidakpuasan publik. Melalui latar tersebut, penulis berita mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa tindakan aparat bukan sekadar peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari respons negara terhadap kritik dan protes masyarakat yang lebih luas.

b) Detail

Detail dalam wacana berfungsi untuk menonjolkan atau mengaburkan informasi tertentu sehingga pembaca diarahkan pada sudut pandang tertentu terhadap realitas sosial (Fairclough, 2015). Elemen detail pada berita ini digunakan untuk menegaskan bahwa objek penyitaan berkaitan dengan literasi dan gagasan kritis.

Tabel 3 Elemen Detail sebagai Strategi *Framing* dalam Berita “Represif Polisi: Menyita Buku Membungkam Pikiran”

Tanpa Detail	Dengan Detail
Polisi menyita buku sebagai barang bukti dalam aksi demonstrasi.	Polisi menyita buku-buku bertema anarkisme seperti <i>Menuju Estetika Anarkisme</i> , <i>Why Am Anarchist</i> , serta <i>Sastra dan Anarkisme</i> yang disebut sebagai referensi literasi kelompok pedemo.
Polisi menggeledah kantor aktivis.	Polisi menggeledah kantor Lokataru Foundation dan menyita buku, spanduk, publikasi penelitian, serta perangkat kerja sebagai bagian dari barang bukti.

Berdasarkan tabel tersebut, penulis berita secara selektif menampilkan detail berupa judul buku, tema bacaan, serta jenis barang yang disita aparat. Penyajian detail tersebut tidak hanya memperkaya informasi, tetapi juga mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa objek penyitaan bukan alat kekerasan atau sarana tindak kriminal, melainkan materi literasi yang berkaitan dengan gagasan kritis. Melalui penonjolan detail tersebut, Kompas.com membangun *framing* bahwa penyitaan buku diposisikan sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpikir, bukan sekadar prosedur penegakan hukum yang netral.

c) Maksud

Maksud berkaitan dengan intensi ideologis penulis berita dalam menyampaikan pesan tertentu kepada pembaca melalui pemilihan informasi dan cara penyajiannya (Wodak & Meyer, 2016). Dalam berita ini, elemen maksud digunakan untuk mengarahkan pembaca agar



memandang penyitaan buku sebagai tindakan yang keliru dan berbahaya bagi demokrasi. Hal tersebut tampak dalam kutipan berikut.

“Kasus penyitaan buku ini bukan hanya persoalan teknis penegakan hukum. Ia adalah gambaran kegagalan aparat negara dalam memahami esensi kebebasan berpikir dan bersuara, sekaligus cerminan ketakutan yang dalam terhadap ideologi alternatif.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penulis berita secara eksplisit mengkritik tindakan aparat yang dianggap lebih memilih menekan gagasan kritis daripada menyelesaikan persoalan substantif bangsa. Maksud tersebut kembali ditegaskan melalui pernyataan berikut.

“Negara ternyata lebih takut terhadap ide daripada menangani masalah substantif.”

Melalui pernyataan di atas, Kompas.com membangun wacana bahwa penyitaan buku diposisikan sebagai bentuk represi intelektual yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berpikir dan kehidupan demokratis.

d) Praanggapan

Praanggapan merupakan asumsi dasar yang dianggap benar oleh penulis berita meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks (Yule, 2014). Dalam berita ini, praanggapan dibangun melalui asumsi bahwa membaca buku, termasuk yang memuat kritik terhadap negara atau ideologi tertentu, merupakan hak dasar warga negara. Hal tersebut tampak dalam kutipan berikut.

“Padahal, membaca buku, bahkan yang berisi kritik keras terhadap negara adalah hak setiap warga yang dilindungi oleh konstitusi.”

Selain itu, berita ini juga memuat praanggapan bahwa penyitaan buku tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang disidik, sebagaimana terlihat pada pernyataan berikut.

“Buku, sebagai benda fisik dan sumber gagasan hanya dapat disita apabila isi atau keberadaannya secara nyata digunakan untuk melakukan kejahatan, bukan sekadar karena ideologi yang diusungnya.”

Praanggapan lain yang dibangun adalah bahwa penyitaan buku mencerminkan ketakutan aparat terhadap ide dan pemikiran alternatif. Hal tersebut tersirat dalam kutipan berikut.

“Penyitaan buku juga mengirimkan pesan buruk bahwa ide dan pemikiran alternatif bisa dijadikan alasan untuk menekan warga negara, membungkam kritik, dan menghapus ruang wacana demokratis.”

Melalui praanggapan tersebut, pembaca diarahkan untuk menerima pandangan bahwa penyitaan buku merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan intelektual dan ruang demokratis masyarakat.

2) Sintaksis

Analisis sintaksis mencakup koherensi teks serta bentuk struktur kalimat, seperti penggunaan kalimat deklaratif, aktif, dan pasif, yang dapat menunjukkan posisi agen penanggungjawab dalam peristiwa sosial (Machin & Mayr, 2019). Dalam berita ini, struktur sintaksis digunakan untuk memperkuat representasi penyitaan buku sebagai tindakan yang membatasi kebebasan berpikir dan berekspresi.



Secara dominan, penulis berita menggunakan kalimat deklaratif untuk menyampaikan informasi sekaligus penilaian secara tegas, sehingga opini kritis ditampilkan seolah bersifat objektif. Hal tersebut tampak pada pernyataan berikut.

“Kasus penyitaan buku ini bukan hanya persoalan teknis penegakan hukum.”

Koherensi teks dibangun melalui penggunaan konjungsi pertentangan dan kausalitas seperti *namun*, *padahal*, dan *alih-alih*, yang berfungsi memperjelas hubungan antargagasan sekaligus memperkuat kritik terhadap tindakan aparat. Contohnya terlihat pada kalimat berikut.

“Namun, reaksi aparat keamanan terhadap protes itu, terutama penyitaan buku sebagai barang bukti, membuka bab baru dalam hubungan negara-masyarakat.”

Dari sisi pronomina, teks bersifat impersonal karena tidak menggunakan kata ganti orang pertama. Namun, secara implisit aparat diposisikan sebagai pelaku tindakan, sedangkan masyarakat ditempatkan sebagai pihak yang terdampak. Pola ini membangun jarak sekaligus mengarahkan pembaca pada posisi evaluatif tertentu terhadap peristiwa yang diberitakan.

Selain itu, penggunaan kalimat aktif lebih banyak digunakan untuk menegaskan aparat sebagai aktor utama, seperti pada pernyataan *“Polisi menyita buku-buku yang dianggap memuat paham anarkisme.”* Sementara itu, kalimat pasif muncul untuk menyoro dampak tindakan tanpa menampilkan aktor secara langsung, seperti pada *“Ide dan pemikiran alternatif bisa dijadikan alasan untuk menekan warga negara.”*

Melalui pola sintaksis tersebut, berita membangun penegasan bahwa tindakan aparat menjadi pusat dari peristiwa, sementara masyarakat ditempatkan sebagai pihak yang mengalami dampaknya.

3). Stilistik

Stilistik berkaitan dengan pilihan leksikal dan gaya bahasa yang digunakan untuk membangun makna serta merepresentasikan sikap ideologis tertentu dalam teks (Jeffries, 2014). Dalam berita ini, analisis stilistik difokuskan pada penggunaan leksikon yang membentuk cara pandang pembaca terhadap tindakan penyitaan buku oleh aparat kepolisian. Pilihan kata yang digunakan menunjukkan kecenderungan penulis berita dalam menilai peristiwa secara kritis.

Penulis berita menggunakan leksikon yang secara langsung membangun citra negatif terhadap tindakan aparat, seperti *represif*, *membungkam*, dan *kriminalitas*. Penggunaan kata *represif* pada judul memberikan penekanan awal bahwa tindakan aparat diposisikan sebagai bentuk penindasan, bukan sekadar prosedur penegakan hukum. Sementara itu, frasa *membungkam pikiran* menegaskan bahwa yang menjadi sasaran bukan hanya buku sebagai objek, tetapi juga kebebasan berpikir masyarakat.

Selain itu, ungkapan seperti *lebih takut terhadap ide* dan *kriminalisasi pemikiran kritis* menggambarkan negara sebagai pihak yang merasa terancam oleh gagasan alternatif. Sebaliknya, buku dan aktivitas membaca direpresentasikan melalui leksikon positif seperti *kebebasan berpikir* dan *kebebasan berekspresi*. Kontras pilihan leksikon ini memperjelas oposisi antara negara sebagai aktor represif dan masyarakat sebagai subjek yang haknya terancam.

Melalui pilihan leksikon tersebut, teks berita membangun pemaknaan bahwa penyitaan buku merupakan bentuk pembatasan kebebasan berpikir yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

3) Retoris

Unsur retorik digunakan untuk melihat bagaimana penekanan makna dibangun melalui strategi bahasa dan visual guna memengaruhi cara pembaca memahami peristiwa yang diberitakan

(van Dijk, 2006). Strategi ini juga berkaitan dengan proses *framing*, yaitu penonjolan aspek tertentu dari realitas untuk membentuk persepsi publik terhadap suatu peristiwa (Entman, 2007). Dalam berita ini, strategi retorik berfungsi menggeser makna penyitaan buku dari tindakan prosedural menjadi simbol pembatasan kebebasan berpikir.

Secara retorik, penulis berita tidak hanya menyampaikan fakta penyitaan, tetapi juga membingkainya melalui penguatan makna simbolik. Metafora *membungkam pikiran* menjadi pusat penekanan yang memperluas makna tindakan fisik penyitaan buku menjadi tindakan ideologis yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan berpikir dan berekspresi.

Strategi retorik juga tampak pada penguatan gagasan tentang ketakutan negara terhadap ide, yang tidak diulang secara langsung, tetapi melalui variasi argumentatif seperti kriminalisasi pemikiran, penyerangan terhadap identitas intelektual, dan pengabaian akar masalah sosial. Pola ini berfungsi memperkuat pesan utama sekaligus menegaskan posisi kritis penulis berita.

Selain bahasa, unsur retorik diperkuat melalui elemen visual berupa foto konferensi pers kepolisian yang menampilkan buku-buku hasil sitaan. Buku-buku tersebut diposisikan sebagai barang bukti dan ditampilkan berdampingan dengan atribut yang identik dengan proses hukum, sementara aparat berseragam berada pada posisi dominan dalam ruang visual.



Gambar 1. Elemen Visual

Sumber: Kompas.com, “Represif Polisi Menyita Buku Membungkam Pikiran” (2025)

Secara retorik, visual tersebut memperkuat makna bahwa buku dan gagasan diperlakukan sebagai ancaman. Dengan demikian, gambar tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi peristiwa, tetapi juga sebagai alat penegasan makna yang mendukung narasi pembungkaman yang dibangun dalam teks berita.

2. Kognisi Sosial

Dalam kerangka Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk, kognisi sosial berkaitan dengan pengetahuan, nilai, dan sistem kepercayaan yang memengaruhi cara produsen teks merepresentasikan suatu peristiwa (van Dijk, 2014). Dalam pemberitaan ini, kognisi sosial penulis menunjukkan cara pandang kritis terhadap tindakan negara yang dinilai membatasi kebebasan berpikir dan berekspresi. Penulis berita tidak memosisikan penyitaan buku semata-mata sebagai tindakan prosedural penegakan hukum, melainkan sebagai persoalan yang berkaitan dengan ruang kebebasan intelektual. Hal tersebut tampak dari kecenderungan penulis menempatkan buku sebagai simbol pengetahuan dan gagasan, sedangkan aparat negara direpresentasikan sebagai pihak yang kurang memahami makna kebebasan berpikir dalam kehidupan demokratis.

Kognisi sosial penulis juga dipengaruhi oleh pemahaman terhadap anarkisme sebagai aliran pemikiran yang tidak selalu identik dengan ancaman keamanan. Dalam teks, anarkisme dipahami sebagai gagasan yang memiliki nilai tertentu dan dapat dikaitkan dengan praktik sosial seperti



gotong royong dan musyawarah. Perspektif tersebut menunjukkan upaya penulis menghadirkan sudut pandang alternatif terhadap narasi dominan negara.

Selain itu, penulis berita memperlihatkan pandangan bahwa keamanan dan ketertiban tidak seharusnya dibangun melalui pembatasan ruang berpikir masyarakat. Oleh karena itu, penyitaan buku dipersepsikan sebagai tindakan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

Melalui kognisi sosial tersebut, Kompas.com merepresentasikan negara sebagai pihak yang cenderung mengendalikan gagasan, sedangkan masyarakat diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan dan berpartisipasi dalam ruang publik secara bebas.

3. Konteks Sosial

Dalam Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk, konteks sosial merujuk pada kondisi sosial, politik, dan ideologis yang melatarbelakangi lahirnya suatu wacana. Pemberitaan mengenai penyitaan buku ini hadir dalam situasi meningkatnya gelombang protes masyarakat terhadap berbagai persoalan struktural, seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kegagalan birokrasi.

Konteks sosial tersebut menunjukkan hubungan yang tegang antara negara dan masyarakat. Dalam situasi ini, aparat keamanan diposisikan sebagai pihak yang mengendalikan ruang kritik publik, sementara masyarakat berada pada posisi yang lebih terbatas dalam menyampaikan gagasan dan ekspresi politik. Relasi tersebut mencerminkan ketimpangan kuasa, di mana negara memiliki otoritas untuk menentukan gagasan yang dianggap aman atau berbahaya dalam kehidupan sosial (Couldry, 2019).

Selain itu, konteks sosial pemberitaan memperlihatkan adanya kecenderungan negara memandang ideologi atau pemikiran alternatif sebagai ancaman terhadap stabilitas. Akibatnya, buku dan gagasan kritis tidak lagi dipahami sebagai sumber pengetahuan, tetapi sebagai objek yang perlu diawasi dan dikendalikan. Paradigma keamanan semacam ini memperlihatkan kuatnya kontrol negara terhadap ruang wacana publik.

Dalam konteks yang lebih luas, penyitaan buku berkaitan dengan persoalan kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi yang dijamin oleh konstitusi. Pembatasan terhadap akses bacaan dan gagasan berpotensi melemahkan iklim demokrasi serta budaya literasi masyarakat karena dapat menimbulkan rasa takut untuk membaca, berdiskusi, dan menyampaikan kritik.

Dengan demikian, konteks sosial dalam pemberitaan ini menunjukkan bahwa penyitaan buku tidak sekadar diposisikan sebagai persoalan hukum atau keamanan, melainkan sebagai bagian dari dinamika relasi kuasa antara negara dan masyarakat dalam ruang demokrasi.

D. KESIMPULAN

Pemberitaan Kompas.com merepresentasikan tindakan penyitaan buku sebagai bentuk pembatasan kebebasan berpikir dan berekspresi. Melalui dimensi teks, pemberitaan dibangun secara konsisten untuk menghadirkan negara sebagai aktor dominan dalam pengendalian ruang intelektual publik. Pada dimensi kognisi sosial, penulis berita menunjukkan cara pandang kritis terhadap tindakan aparat yang dipersepsikan lebih berorientasi pada pengendalian gagasan dibandingkan penyelesaian persoalan sosial yang substantif. Sementara itu, pada dimensi konteks sosial, pemberitaan lahir dalam situasi meningkatnya ketegangan antara negara dan masyarakat di tengah kritik publik terhadap persoalan demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa model Analisis Wacana Kritis van Dijk mampu mengungkap keterkaitan antara strategi kebahasaan, cara pandang produsen teks, dan relasi kuasa dalam pemberitaan media digital. Penelitian ini juga menegaskan bahwa media tidak



hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi turut membentuk konstruksi makna dan posisi ideologis terhadap suatu peristiwa sosial.

Secara akademik, penelitian ini memperluas kajian Analisis Wacana Kritis pada isu kebebasan berpikir dan penyitaan buku yang masih relatif terbatas dibandingkan kajian politik dan kriminalitas dalam media. Namun, penelitian ini masih terbatas pada satu teks berita dari satu media digital sehingga belum dapat menggambarkan kecenderungan wacana media secara umum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas data dan melakukan perbandingan antar media agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi wacana dalam pemberitaan isu kebebasan berekspresi dan demokrasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Banjarnahor, L. E., Annisa, N. F., Yulianti, N., Purba, Y. G., Simamora, D. T., & Siregar, M. W. (2024). Analisis wacana kritis Van Dijk pada teks berita online kasus pembunuhan serta pemerkosaan Vina dan kekasihnya pada media Liputan6.com. *Pragmatik: Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa dan Pendidikan*, 2(3), 42–51. <https://doi.org/10.61132/pragmatik.v2i3.674>
- Couldry, N. (2019). *The media and social theory*. Polity Press.
- Deuze, M., & McQuail, D. (2020). *Teori komunikasi massa McQuail* (Edisi ke-7). Salemba Humanika.
- Entman, R. M. (2007). Framing bias: Media in the distribution of power. *Journal of Communication*, 57(1), 163–173. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00336>
- Fairclough, N. (2015). *Language and power* (3rd ed.). Routledge.
- Habermas, J. (2006). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Jeffries, L. (2014). *Critical stylistics*. Edinburgh University Press.
- Karmizi, Y., & Gustia, M. M. (2025). Analisis wacana kritis model Van Dijk pada pemberitaan ijazah palsu Jokowi di media online. *Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra*, 12(2), 167–175. <https://doi.org/10.30595/mtf.v12i2.28213>
- Kompas.com. (2025, September 18). *Represif polisi: Menyita buku membungkam pikiran*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/18/07453051/represif-polisi-menyita-buku-membungkam-pikiran>
- Machin, D., & Mayr, A. (2019). *How to do critical discourse analysis*. Sage.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (T. T. Rohidi, Ed.). UI-Press.
- Putri, C. D., Aliya, N., Nabila, A., & Juwaira, A. (2025). Analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk terhadap wacana pro-kontra pengiriman anak ke barak militer dalam pemberitaan daring Liputan6.com. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(2), 715–720. <https://doi.org/10.62710/zs8cgy91>
- Rahma, Z., Mujaddidah, S. Y., & Suganda, O. A. (2026). Wacana empati presiden atas kematian Affan Kurniawan: Analisis wacana kritis. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 18(3), 91–100. <https://ejournal.cibinstituit.com/index.php/sindoro/article/view/5240>
- Rahmawati, L. R., Wijayanto, X. A., & Nurhajati, L. (2023). Building democracy and freedom of expression by fighting the Covid-19 infodemic in the digital space among Gen Z in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 8(1), 239–249. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v8i1.861>
- Simanungkalit, K. E., Wardani, N. E., Saddhono, K., & Rohmadi, M. (2025). Analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk pada berita viral pembatalan pernikahan Batak. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 14(2), 670. <https://doi.org/10.26499/rnh.v14i2.8432>



- van Dijk, T. A. (2006). Discourse and manipulation. *Discourse & Society*, 17(3), 359–383.
<https://doi.org/10.1177/0957926506060250>
- van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and context: A sociocognitive approach*. Cambridge University Press.
- van Dijk, T. A. (2009). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan.
- van Dijk, T. A. (2013). News, discourse, and ideology. In T. A. van Dijk (Ed.), *The handbook of discourse analysis* (2nd ed.). Wiley.
- van Dijk, T. A. (2014). *Discourse and knowledge: A sociocognitive approach*. Cambridge University Press.
- van Dijk, T. A. (2018). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan.
- van Dijk, T. A. (2021). Critical discourse studies: A sociocognitive approach. In J. Flowerdew & J. E. Richardson (Eds.), *The Routledge handbook of critical discourse studies* (pp. 26–41). Routledge.
- Wodak, R., & Meyer, M. (2016). *Methods of critical discourse studies* (3rd ed.). Sage.
- Yule, G. (2014). *The study of language* (5th ed.). Cambridge University Press.